

Pendidikan Islam di Turki

Khairul Abrar¹, Dede Rosyada², Muhammad Zalnur³

^{1,2,3} Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

e-mail: akbarhai221@gmail.com

Abstrak

Pendidikan Islam di Turki telah mengalami perkembangan yang kompleks dan dinamis sepanjang sejarahnya. Sebagai negara yang menjembatani dua benua, Asia dan Eropa, Turki memiliki posisi unik dalam perkembangan pendidikan Islam. Negara yang dulunya merupakan pusat Kekhalifahan Utsmaniyah selama berabad-abad telah mengalami transformasi signifikan, terutama setelah pembentukan Republik Turki modern oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1923. Perubahan ini membawa dampak mendalam pada sistem pendidikan Islam yang telah berakar kuat dalam budaya dan masyarakat Turki. Sejak era Utsmaniyah, pendidikan Islam di Turki telah menjadi pilar utama dalam mentransmisikan nilai-nilai dan pengetahuan Islam. Lembaga-lembaga seperti *madrasah*, *maktab*, dan *kuttub* memainkan peran penting dalam mengajarkan Al-Qur'an, Hadits, fiqh, dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Namun, transisi ke republik sekuler membawa perubahan fundamental dalam sistem pendidikan dengan pengenalan kebijakan sekularisasi yang dikenal sebagai reformasi Kemalis. Kebijakan ini bertujuan untuk memoderenisasi negara dengan mengurangi pengaruh Islam dalam kehidupan publik, termasuk dalam sistem pendidikan. Dinamika politik dan sosial yang kompleks di Turki telah membentuk lanskap pendidikan Islam kontemporer di negara tersebut. Pergulatan antara sekularisme dan nilai-nilai Islam terus mempengaruhi kebijakan pendidikan, kurikulum, dan praktik pengajaran. Kebangkitan Islam yang terjadi sejak tahun 1950-an dan semakin menguat pada dekade-dekade berikutnya telah mendorong peningkatan minat dan permintaan terhadap pendidikan Islam. Hal ini tercermin dalam pembukaan kembali dan peningkatan jumlah sekolah Imam-Hatip, ekspansi program pendidikan Islam di universitas, dan pengenalan kembali pendidikan agama di sekolah-sekolah umum.

Kata kunci: *Pendidikan, Islam, Turki*

Abstract

Islamic education in Turkey has undergone complex and dynamic developments throughout its history. As a country that bridges two continents, Asia and Europe, Turkey has a unique position in the development of Islamic education. The country that was once the center of the Ottoman Caliphate for centuries has undergone significant transformations, especially after the establishment of the modern Republic of Turkey by Mustafa Kemal Atatürk in 1923. These changes had a profound impact on the Islamic education system that has been deeply rooted in Turkish culture and society. Since the Ottoman era, Islamic education in Turkey has been a major pillar in transmitting Islamic values and knowledge. Institutions such as *madrasahs*, *maktabs*, and *kuttabs* played a vital role in teaching the Qur'an, Hadith, fiqh, and other Islamic sciences. However, the transition to a secular republic brought about fundamental changes in the education system with the introduction of secularization policies known as the Kemalist reforms. These policies aimed to modernize the country by reducing the influence of Islam in public life, including the education system. The complex political and social dynamics in Turkey have shaped the contemporary landscape of Islamic education in the country. The struggle between secularism and Islamic values continues to influence educational policies, curricula, and teaching practices. The Islamic revival that began in the 1950s and has grown stronger in subsequent decades has led to increased interest and demand for Islamic education. This is reflected in the reopening and increase in the number of Imam-Hatip schools, the expansion of Islamic education programs in universities, and the reintroduction of religious education in public schools.

Keywords: *Education, Islam, Türkiye*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Turki telah mengalami perkembangan yang kompleks dan dinamis sepanjang sejarahnya. Sebagai negara yang menjembatani dua benua, Asia dan Eropa, Turki memiliki posisi unik dalam perkembangan pendidikan Islam. Negara yang dulunya merupakan pusat Kekhalifahan Utsmaniyah selama berabad-abad telah mengalami transformasi signifikan, terutama setelah pembentukan Republik Turki modern oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1923. Perubahan ini membawa dampak mendalam pada sistem pendidikan Islam yang telah berakar kuat dalam budaya dan masyarakat Turki.

Sejak era Utsmaniyah, pendidikan Islam di Turki telah menjadi pilar utama dalam mentransmisikan nilai-nilai dan pengetahuan Islam. Lembaga-lembaga seperti *madrrasah*, *maktab*, dan *kuttap* memainkan peran penting dalam mengajarkan Al-Qur'an, Hadits, fiqh, dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Namun, transisi ke republik sekuler membawa perubahan fundamental dalam sistem pendidikan dengan pengenalan kebijakan sekularisasi yang dikenal sebagai reformasi Kemalis. Kebijakan ini bertujuan untuk memoderenisasi negara dengan mengurangi pengaruh Islam dalam kehidupan publik, termasuk dalam sistem pendidikan (Azra, 2018).

Dinamika politik dan sosial yang kompleks di Turki telah membentuk lanskap pendidikan Islam kontemporer di negara tersebut. Pergulatan antara sekularisme dan nilai-nilai Islam terus mempengaruhi kebijakan pendidikan, kurikulum, dan praktik pengajaran. Kebangkitan Islam yang terjadi sejak tahun 1950-an dan semakin menguat pada dekade-dekade berikutnya telah mendorong peningkatan minat dan permintaan terhadap pendidikan Islam. Hal ini tercermin dalam pembukaan kembali dan peningkatan jumlah sekolah Imam-Hatip, ekspansi program pendidikan Islam di universitas, dan pengenalan kembali pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (Hasan, 2019).

Makalah tentang pendidikan Islam di Turki menjadi semakin relevan mengingat peran strategis Turki dalam geopolitik global dan posisinya sebagai model potensial bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang berupaya menyeimbangkan modernitas dengan nilai-nilai Islam. Studi tentang pendidikan Islam di Turki juga menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana sistem pendidikan dapat beradaptasi dan bertransformasi dalam konteks perubahan sosial-politik yang dinamis (Nurhakim, 2017). Keunikan pendidikan Islam di Turki terletak pada bagaimana ia telah berkembang di tengah tegangan antara sekularisme negara dan identitas Islam masyarakat. Sejak berdirinya Republik Turki pada tahun 1923, kebijakan pendidikan telah mengalami perubahan signifikan sesuai dengan pergeseran ideologi politik pemerintah yang berkuasa. Era Kemalis (1923-1950) ditandai dengan sekularisasi yang ketat dan pengurangan pendidikan Islam, sementara periode multipartai sejak tahun 1950 hingga saat ini telah menyaksikan berbagai tingkat reintegrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional (Harahap, 2020).

Pendidikan Islam di Turki kontemporer mencakup spektrum luas institusi dan praktik, mulai dari pendidikan Al-Qur'an informal di masjid-masjid hingga program studi Islam di universitas negeri. Sekolah Imam-Hatip, yang awalnya didirikan untuk melatih imam dan khatib, telah berkembang menjadi institusi pendidikan menengah utama yang menawarkan kurikulum umum bersama dengan pendidikan agama yang intensif. Fakultas Teologi (İlahiyat Fakülteleri) di universitas-universitas negeri juga memainkan peran penting dalam pendidikan Islam tingkat tinggi dan produksi pengetahuan Islam (Muhaimin, 2021).

Konteks politik Turki yang berubah sejak awal tahun 2000-an, terutama di bawah pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), telah membawa pergeseran lebih lanjut dalam pendidikan Islam. Kebijakan-kebijakan baru telah memperluas akses ke pendidikan Islam dan meningkatkan kehadiran agama dalam kurikulum nasional. Perubahan ini telah memicu perdebatan tentang laicisme, identitas nasional, dan tujuan pendidikan di Turki (Amalia, 2018).

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pendidikan Islam di Turki dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial-politik, dan budaya yang membentuknya. Studi ini akan menyelidiki berbagai bentuk dan manifestasi pendidikan Islam di Turki kontemporer, serta implikasinya bagi masyarakat Turki dan dunia Islam yang lebih luas. Dengan fokus pada kebijakan

pendidikan, kurikulum, pedagogi, dan dinamika kelembagaan, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang peran dan posisi pendidikan Islam dalam lanskap pendidikan Turki yang lebih luas.

Lebih khusus lagi, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pendidikan Islam di Turki telah beradaptasi dengan modernitas dan sekularisme, serta bagaimana ia telah merespons tantangan globalisasi dan perubahan sosial-politik. Studi ini juga akan menyelidiki dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap identitas nasional, kohesi sosial, dan perkembangan masyarakat sipil di Turki (Wibowo, 2020). Pendidikan Islam di Turki menawarkan studi kasus yang berharga tentang bagaimana tradisi pendidikan agama dapat beradaptasi dan bertransformasi dalam konteks negara yang secara resmi berkomitmen pada sekularisme. Pengalaman Turki menyoroti kompleksitas hubungan antara agama dan negara dalam masyarakat Muslim kontemporer, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menyeimbangkan warisan Islam dengan tuntutan modernitas (Nugraha, 2021).

Literatur tentang pendidikan Islam di Turki telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu termasuk pendidikan, studi Islam, sosiologi, ilmu politik, dan sejarah. Karya-karya seminal seperti "Pendidikan Islam di Turki: Antara Sekularisme dan Religiusitas" oleh Azyumardi Azra (2018) dan "Dinamika Pendidikan Islam di Turki" oleh Noorhaidi Hasan (2019) telah memberikan kerangka kerja konseptual yang berharga untuk memahami dinamika sosial-politik yang membentuk pendidikan Islam di Turki.

Studi empiris yang lebih baru oleh sarjana Indonesia seperti Muhamad Nurhakim (2017) dan Syaiful Harahap (2020) telah menyoroti perubahan dalam kebijakan pendidikan agama dan implikasinya bagi masyarakat Turki. Penelitian mereka mengungkapkan kompleksitas hubungan antara negara, agama, dan pendidikan dalam konteks Turki kontemporer, serta bagaimana pendidikan Islam telah menjadi bidang kontestasi ideologis dan politik. Meskipun terdapat literatur yang substansial tentang topik ini, masih ada kesenjangan dalam pemahaman kita tentang dinamika mikro pendidikan Islam di Turki, khususnya bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam praktik di tingkat lokal dan bagaimana siswa, guru, dan orang tua menegosiasikan kompleksitas tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyediakan analisis kontekstual dan nuansa tentang perkembangan kontemporer dalam pendidikan Islam di Turki.

Signifikansi makalah ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman kita tentang peran pendidikan dalam transmisi nilai-nilai agama dan budaya, serta dalam pembentukan identitas nasional. Dengan meneliti kasus Turki, studi ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana sistem pendidikan dapat menavigasi tensi antara sekularisme dan religiusitas, tradisi dan modernitas, serta identitas lokal dan global (Suharto, 2021). Metodologi penulisan ini akan menggabungkan analisis kebijakan kritis, studi historis, dan penelitian empiris untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pendidikan Islam di Turki. Pendekatan multidisipliner ini akan memungkinkan eksplorasi yang lebih dalam tentang konteks sosial-politik, dinamika institusional, dan pengalaman hidup yang membentuk lanskap pendidikan Islam di Turki. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan berkontribusi pada literatur tentang pendidikan Islam di Turki tetapi juga pada pemahaman kita yang lebih luas tentang interseksi antara agama, pendidikan, dan politik di masyarakat Muslim kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pendidikan Islam di Turki. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pendidikan Islam di Turki tersebut, serta memahami konteks dan dinamika yang terjadi dalam proses pembelajaran Rohendi (2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Turki merupakan negara unik yang memiliki posisi geografis strategis karena terletak di dua benua sekaligus, yaitu Eropa dan Asia. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 783.562 km² dengan sebagian besar wilayahnya (97%) berada di Asia yang dikenal sebagai Anatolia, sementara sisanya (3%) berada di Eropa yang dikenal sebagai Thrace. Posisi geografis ini

menjadikan Turki sebagai jembatan yang menghubungkan peradaban Barat dan Timur, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan di kawasan tersebut (Amalia, 2018). Secara demografis, Turki memiliki populasi sekitar 84 juta jiwa dengan mayoritas penduduknya beragama Islam (sekitar 99%). Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Turki dikenal sebagai negara dengan sistem pemerintahan sekuler sejak berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Transformasi dari Kekhalifahan Utsmaniyah menjadi negara republik sekuler ini telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Turki, termasuk dalam bidang pendidikan (Nurhakim, 2020).

Secara historis, Turki memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Wilayah yang kini menjadi Turki modern telah dihuni oleh berbagai peradaban sejak zaman kuno, termasuk Hittite, Yunani, Romawi, Bizantium, dan akhirnya Kekhalifahan Utsmaniyah. Kekhalifahan Utsmaniyah yang didirikan oleh Osman I pada akhir abad ke-13 berkembang menjadi salah satu kekaisaran terbesar dan terkuat dalam sejarah dunia, yang pada puncak kejayaannya meliputi wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian Eropa Tenggara (Harahap, 2017). Kekhalifahan Utsmaniyah memegang peranan penting dalam penyebaran dan pengembangan pendidikan Islam di berbagai wilayah kekuasaannya. Sistem pendidikan Islam yang dikembangkan selama era Utsmaniyah mencakup berbagai tingkatan, mulai dari madrasah dasar hingga perguruan tinggi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama tetapi juga ilmu-ilmu umum seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Pendidikan Islam pada masa ini mengalami perkembangan pesat dan menjadi model bagi sistem pendidikan di berbagai wilayah Muslim lainnya (Amin, 2019).

Namun, seiring dengan melemahnya Kekhalifahan Utsmaniyah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, sistem pendidikan tradisional Islam mulai menghadapi tantangan dari pengaruh modernisasi dan westernisasi. Upaya reformasi dalam sistem pendidikan mulai dilakukan untuk mengadopsi model pendidikan Barat yang dianggap lebih maju dan sesuai dengan tuntutan zaman. Reformasi ini semakin intensif setelah berdirinya Republik Turki di bawah kepemimpinan Atatürk, yang menerapkan kebijakan sekularisasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan (Hasan, 2018). Sebagai bagian dari kebijakan sekularisasi, Atatürk melakukan reformasi pendidikan yang radikal, termasuk penghapusan sistem madrasah tradisional, pengenalan alfabet Latin menggantikan alfabet Arab, dan pembentukan sistem pendidikan nasional yang terinspirasi oleh model Barat. Kebijakan ini bertujuan untuk memodernisasi dan mengatasi ketertinggalan Turki dari negara-negara Barat, namun pada saat yang sama juga mengakibatkan terputusnya sebagian warisan intelektual dan budaya Islam yang telah berakar kuat dalam masyarakat Turki selama berabad-abad (Fadhillah, 2019).

Meskipun demikian, identitas Islam tetap menjadi bagian integral dari masyarakat Turki dan terus mempengaruhi kehidupan sosial-budaya mereka. Hal ini terlihat dalam perkembangan politik Turki pasca-era Atatürk, di mana partai-partai politik dengan orientasi Islam mulai bermunculan dan mendapatkan dukungan signifikan dari masyarakat. Kebangkitan politik Islam ini juga berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan, dengan adanya upaya untuk mengintegrasikan kembali nilai-nilai dan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional (Syahputra, 2021). Salah satu manifestasi dari upaya ini adalah pembukaan kembali dan pengembangan sekolah Imam-Hatip, yang awalnya didirikan pada tahun 1924 sebagai lembaga untuk melatih imam dan khatib. Sekolah-sekolah ini mengalami perkembangan pesat terutama sejak tahun 1950-an dan telah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Turki. Sekolah Imam-Hatip menawarkan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan umum dengan pendidikan agama Islam, sehingga menjadi alternatif bagi keluarga Muslim yang menginginkan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan agama yang lebih intensif (Widodo, 2019).

Selain itu, pendidikan tinggi Islam juga mengalami perkembangan dengan adanya fakultas teologi (İlahiyat Fakültesi) di berbagai universitas negeri. Fakultas-fakultas ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan Islam tingkat tinggi tetapi juga menjadi pusat penelitian dan pengembangan pemikiran Islam kontemporer. Para sarjana dan lulusan dari fakultas-fakultas ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam upaya kontekstualisasi ajaran Islam dalam masyarakat Turki modern (Rahman, 2020). Dalam perkembangan kontemporer, kebijakan pendidikan Islam di Turki terus mengalami dinamika seiring dengan perubahan lanskap politik negara tersebut. Di bawah

pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa sejak tahun 2002, terdapat kecenderungan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan seperti penambahan jam pelajaran agama di sekolah-sekolah umum, perluasan sekolah Imam-Hatip, dan peningkatan alokasi anggaran untuk lembaga-lembaga pendidikan Islam (Mudzakkir, 2018).

Dinamika pendidikan Islam di Turki mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama dan negara dalam konteks negara sekuler dengan mayoritas penduduk Muslim. Di satu sisi, terdapat komitmen konstitusional terhadap sekularisme sebagai prinsip dasar negara, sementara di sisi lain, identitas Islam tetap menjadi bagian penting dari identitas nasional dan individual masyarakat Turki. Ketegangan antara sekularisme dan Islam ini telah membentuk karakteristik unik pendidikan Islam di Turki, yang berupaya menyeimbangkan antara nilai-nilai universal Islam dengan tuntutan modernitas dan konteks lokal (Nugraha, 2021). Pengalaman Turki dalam mengembangkan pendidikan Islam dalam kerangka negara sekuler menawarkan perspektif berharga bagi negara-negara Muslim lainnya, termasuk Indonesia, dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tuntutan modernitas. Studi komparatif antara model pendidikan Islam di Turki dan Indonesia dapat memberikan wawasan tentang bagaimana dua negara dengan mayoritas penduduk Muslim namun dengan latar belakang historis dan sistem politik yang berbeda merespon tantangan dan peluang dalam pengembangan pendidikan Islam kontemporer (Maulana, 2017).

Islam di Turki

Islam di Turki memiliki sejarah panjang dan kompleks yang telah membentuk identitas nasional, sosial, dan budaya masyarakat Turki hingga saat ini. Kedatangan Islam di wilayah Anatolia bermula pada abad ke-7 Masehi melalui kontak dengan bangsa Arab yang membawa ajaran Islam. Namun, proses islamisasi secara masif terjadi setelah kemenangan Seljuk Turki atas Bizantium dalam Pertempuran Manzikert pada tahun 1071, yang membuka jalan bagi masuknya orang-orang Turki Muslim ke wilayah Anatolia. Proses islamisasi ini kemudian diperkuat selama era Kekhalifahan Utsmaniyah yang berkuasa selama lebih dari enam abad (1299-1922) dan menjadikan Islam sebagai agama resmi negara (Karim, 2019).

Selama era Utsmaniyah, Islam menjadi elemen fundamental yang menyatukan beragam etnis dan kelompok dalam kekhalifahan yang luas. Sultan Utsmaniyah tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin politik tetapi juga sebagai khalifah, pemimpin spiritual komunitas Muslim global. Lembaga-lembaga Islam seperti madrasah, tekke (zawiyah), dan masjid berkembang pesat dan menjadi pusat pendidikan, spiritual, dan sosial masyarakat. Ulama menduduki posisi penting dalam struktur sosial-politik, dengan Sheikh al-Islam sebagai otoritas tertinggi dalam masalah agama yang bahkan memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa tentang keputusan sultan (Hasyim, 2018).

Transformasi radikal terjadi dengan runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah pasca Perang Dunia I dan berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Sebagai bagian dari proyek modernisasi dan westernisasi, Atatürk menerapkan serangkaian reformasi sekuler yang secara fundamental mengubah posisi Islam dalam negara dan masyarakat Turki. Reformasi ini mencakup penghapusan kekhalifahan (1924), penghapusan sistem pengadilan syariah, penggantian hukum Islam dengan kode sipil Barat, pengenalan kalender Gregorian, dan penghapusan Islam sebagai agama negara dari konstitusi (Azra, 2017).

Meskipun langkah-langkah sekularisasi ini bertujuan untuk meminimalkan peran Islam dalam ruang publik, Islam tetap menjadi bagian integral dari identitas budaya dan sosial masyarakat Turki. Sekularisme yang diterapkan di Turki, yang dikenal sebagai laiklik, berbeda dengan model Barat karena melibatkan kontrol negara atas agama daripada pemisahan total antara keduanya. Hal ini terwujud dalam pembentukan Direktorat Urusan Agama (Diyinet İşleri Başkanlığı) pada tahun 1924, yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi aktivitas keagamaan, termasuk pengelolaan masjid, pelatihan imam, dan penerbitan khutbah Jumat (Rahman, 2020). Periode pasca-Atatürk menyaksikan fluktuasi dalam hubungan antara Islam dan negara di Turki. Setelah pengenalan sistem multipartai pada tahun 1946, partai-partai politik mulai mempertimbangkan sentimen keagamaan pemilih, yang mengarah pada pelanggaran bertahap

kebijakan sekuler yang kaku. Pada tahun 1950-an, pemerintah Partai Demokrat di bawah Adnan Menderes memperkenalkan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri dan membuka sekolah Imam-Hatip untuk melatih imam dan khatib. Periode ini juga ditandai dengan kebangkitan aktivitas tarekat sufi yang sebelumnya dilarang, meskipun mereka tetap beroperasi di luar kerangka hukum resmi (Mukti, 2019).

Dimensi penting dari Islam di Turki adalah keberagaman tradisi dan interpretasi keagamaan yang ada dalam masyarakat. Selain Islam Sunni yang dominan (khususnya mazhab Hanafi), terdapat minoritas signifikan Alevi (sekitar 15-20% populasi) yang menganut bentuk Islam yang lebih sinkretis dengan elemen-elemen Syiah dan tradisi pra-Islam. Komunitas Sufi juga memainkan peran penting dalam sejarah keagamaan Turki, dengan tarekat seperti Naqshbandiyah, Mevlevi, dan Bektashi yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk ekspresi keagamaan dan budaya (Hasan, 2018). Kebangkitan Islam di Turki menjadi semakin terlihat sejak tahun 1980-an, didorong oleh berbagai faktor termasuk urbanisasi, pertumbuhan kelas menengah Muslim, dan ketidakpuasan dengan ideologi sekuler Kemalis. Periode ini menyaksikan peningkatan partisipasi dalam praktik keagamaan, peningkatan penggunaan simbol-simbol Islam seperti jilbab, dan munculnya kelas pengusaha Muslim yang religius yang dikenal sebagai "Macan-macan Anatolia". Pergerakan seperti komunitas Gülen (yang kemudian dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Turki setelah upaya kudeta tahun 2016) juga muncul selama periode ini, mengadvokasi sintesis Islam dengan modernitas dan melakukan ekspansi global melalui lembaga pendidikan dan bisnis (Nurlaelawati, 2019).

Perkembangan paling signifikan dalam lanskap Islam politik di Turki adalah kebangkitan dan transformasi gerakan Islam politik, dari Partai Kesejahteraan (Refah Partisi) yang dipimpin oleh Necmettin Erbakan pada tahun 1990-an hingga Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang didirikan pada tahun 2001 oleh Recep Tayyip Erdoğan. Meskipun AKP menjauhkan diri dari label "Islam politik" dan mendefinisikan dirinya sebagai partai "konservatif demokrat", partai ini telah mengambil pendekatan yang lebih akomodatif terhadap Islam dalam ruang publik dibandingkan dengan pendahulunya yang sekuler. Sejak berkuasa pada tahun 2002, AKP telah menerapkan kebijakan yang secara bertahap meningkatkan visibilitas Islam dalam masyarakat Turki, termasuk penghapusan larangan jilbab di universitas dan institusi negara, peningkatan jumlah sekolah Imam-Hatip, dan konstruksi masjid-masjid baru (Suharto, 2021). Periode kepemimpinan Erdoğan, terutama setelah transformasinya dari Perdana Menteri menjadi Presiden pada tahun 2014 dan konsolidasi kekuasaan pasca upaya kudeta 2016, telah ditandai oleh penekanan yang semakin eksplisit pada identitas Islam Turki dalam wacana nasional dan kebijakan pemerintah. Retorika resmi semakin menekankan masa kejayaan Ottoman dan warisan Islam Turki, yang terkadang dipandang sebagai upaya "de-sekularisasi" atau "re-Islamisasi" masyarakat. Proyek-proyek simbolis seperti pembangunan Masjid Çamlıca yang megah di Istanbul dan konversi kembali Hagia Sophia menjadi masjid pada tahun 2020 mencerminkan kecenderungan ini (Hidayat, 2021).

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa masyarakat Turki tetap terpolarisasi dalam hal hubungan yang diinginkan antara Islam dan negara. Sementara sebagian besar penduduk mendukung peran yang lebih besar bagi Islam dalam kehidupan publik, segmen signifikan lainnya, terutama di daerah perkotaan Barat dan di kalangan elit sekuler, tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip sekularisme Kemalis. Polarisasi ini mencerminkan ketegangan yang berkelanjutan antara tradisi Islam dan modernitas sekuler yang telah membentuk politik dan masyarakat Turki sejak berdirinya republik (Wibowo, 2020).

Islam di Turki kontemporer juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, termasuk hubungan Turki dengan dunia Arab, Eropa, dan komunitas global. Di bawah kepemimpinan AKP, Turki berusaha memosisikan dirinya sebagai model bagi negara-negara Muslim lain, menggabungkan Islam, demokrasi, dan ekonomi pasar. Kebijakan luar negeri Turki, terutama selama Arab Spring, mencerminkan ambisi untuk memperluas pengaruhnya di dunia Muslim dan membangun peran kepemimpinan regional. Namun, pendekatan ini juga telah menghadapi tantangan karena perkembangan politik di kawasan tersebut dan perubahan dalam dinamika geopolitik global (Masruri, 2021).

Sistim Pendidikan Islam di Turki

Sistem pendidikan Islam di Turki telah mengalami dinamika yang kompleks seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ideologi negara tersebut. Secara historis, pendidikan Islam di Turki berakar pada tradisi Kekhalifahan Utsmaniyah yang menjadikan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, kuttab, dan halaqah sebagai institusi utama dalam mentransmisikan pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Pada masa kejayaan Utsmaniyah, madrasah-madrasah seperti Sahn-ı Seman dan Süleymaniye menjadi pusat pembelajaran Islam yang prestisius dengan kurikulum yang mencakup ilmu-ilmu naqliyah dan aqliyah (Zulkarnain, 2018).

Transformasi radikal terjadi setelah berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Sebagai bagian dari kebijakan sekularisasi yang dikenal sebagai reformasi Kemalis, sistem madrasah tradisional dihapuskan dan digantikan dengan sistem pendidikan sekuler yang terinspirasi dari model Barat. Undang-Undang Unifikasi Pendidikan (Tevhid-i Tedrisat) tahun 1924 menetapkan bahwa semua lembaga pendidikan berada di bawah kontrol Kementerian Pendidikan Nasional. Meskipun demikian, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama, pemerintah mendirikan sekolah Imam-Hatip yang awalnya bertujuan untuk melatih imam dan khatib masjid (Habiburrahman, 2019).

Sekolah Imam-Hatip mengalami fluktuasi dalam perkembangannya, seiring dengan perubahan kebijakan politik. Setelah mengalami penutupan selama era partai tunggal (1931-1949), sekolah-sekolah ini dibuka kembali pada era multipartai dan mengalami ekspansi signifikan terutama sejak tahun 1970-an. Kurikulum Imam-Hatip mengintegrasikan pendidikan umum dengan pendidikan agama Islam, dengan komposisi sekitar 40% mata pelajaran agama dan 60% mata pelajaran umum. Mata pelajaran agama meliputi Al-Qur'an, Tafsir, Hadits, Fikih, Sejarah Islam, dan Bahasa Arab, sementara mata pelajaran umum mencakup matematika, sains, sastra, dan bahasa asing (Wibowo, 2020).

Pendidikan tinggi Islam di Turki diwadahi dalam Fakultas Teologi (İlahiyat Fakülteleri) yang terdapat di berbagai universitas negeri. Fakultas ini menawarkan program studi di bidang studi Islam dengan pendekatan yang mengkombinasikan metode penelitian tradisional dan modern. Kurikulum fakultas teologi mencakup disiplin ilmu klasik seperti tafsir, hadits, fikih, kalam, dan tasawuf, serta disiplin ilmu modern seperti sosiologi agama, psikologi agama, dan filsafat agama. Fakultas-fakultas ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan tetapi juga sebagai pusat penelitian yang berkontribusi pada pengembangan pemikiran Islam kontemporer (Muhaimin, 2021).

Selain pendidikan formal, pendidikan Islam non-formal juga memainkan peran penting dalam masyarakat Turki. Kursus Al-Qur'an (Kur'an Kursu) yang dikelola oleh Diyanet (Direktorat Urusan Agama) menyediakan pendidikan dasar tentang Al-Qur'an dan praktik keagamaan bagi anak-anak dan orang dewasa. Selain itu, tarekat sufi dan berbagai gerakan Islam seperti komunitas Gülen (sebelum dinyatakan sebagai organisasi teroris pasca upaya kudeta 2016) juga telah berkontribusi dalam pendidikan Islam melalui pendirian sekolah-sekolah dan kegiatan edukasi lainnya (Saifuddin, 2019).

Era pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) sejak 2002 telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap pendidikan Islam di Turki. Kebijakan pendidikan pemerintah AKP menunjukkan kecenderungan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi pendidikan Islam, yang tercermin dalam ekspansi sekolah Imam-Hatip, peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan agama, dan pengenalan mata pelajaran pilihan keagamaan di sekolah-sekolah umum. Kebijakan ini sering dipandang sebagai bagian dari agenda yang lebih luas untuk memperkuat identitas Islam dalam masyarakat Turki (Nurhasanah, 2022).

Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam

Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam di Turki telah mengalami dinamika yang kompleks seiring dengan perubahan rezim politik dan orientasi ideologis negara tersebut. Transformasi mendasar terjadi pasca runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah dan berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Sebagai bagian dari proyek sekularisasi dan modernisasi, Atatürk menerapkan kebijakan radikal terhadap pendidikan

Islam yang sebelumnya menjadi arus utama dalam sistem pendidikan Utsmaniyah (Hidayati, 2018).

Langkah paling signifikan dalam transformasi ini adalah disahkannya Undang-Undang Unifikasi Pendidikan (Tevhid-i Tedrisat) pada 3 Maret 1924. Undang-undang ini menetapkan pengalihan seluruh lembaga pendidikan, termasuk madrasah, ke bawah kendali Kementerian Pendidikan Nasional. Konsekuensinya, madrasah tradisional yang sebelumnya menjadi tulang punggung pendidikan Islam ditutup, dan sistem pendidikan sekuler yang terinspirasi model Barat diperkenalkan. Meskipun demikian, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama dan menyediakan tenaga profesional keagamaan, pemerintah membuka sekolah Imam-Hatip dan Fakultas Teologi di Istanbul (Zulkifli, 2019).

Era partai tunggal (1923-1950) ditandai dengan kebijakan sekularisasi yang ketat, yang pada tahun 1930-an menyebabkan penutupan sekolah Imam-Hatip dan Fakultas Teologi. Pendidikan agama praktis dihilangkan dari kurikulum sekolah umum, mencerminkan komitmen rezim terhadap sekularisme radikal. Situasi ini mulai berubah dengan transisi ke sistem multipartai pada tahun 1946 dan kemenangan Partai Demokrat pada pemilu 1950. Di bawah pemerintahan Adnan Menderes (1950-1960), pendidikan agama diperkenalkan kembali di sekolah-sekolah umum, meskipun sebagai mata pelajaran pilihan. Periode ini juga menyaksikan pembukaan kembali sekolah Imam-Hatip dan pembentukan Institut Tinggi Islam sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat untuk pendidikan Islam yang lebih luas (Rahman, 2020).

Kebijakan pendidikan Islam mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan rezim politik yang dipengaruhi oleh intervensi militer (1960, 1971, 1980, 1997). Khususnya, "kudeta pasca-modern" 28 Februari 1997 membawa dampak negatif signifikan terhadap pendidikan Islam dengan penerapan wajib belajar delapan tahun yang mengakibatkan penutupan tingkat menengah pertama sekolah Imam-Hatip. Selain itu, lulusan sekolah Imam-Hatip menghadapi diskriminasi dalam sistem penerimaan universitas, yang secara efektif membatasi akses mereka ke program studi selain teologi (Harahap, 2018).

Perubahan dramatis terjadi dengan naiknya Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) ke tampuk kekuasaan pada tahun 2002. Pemerintahan AKP di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan secara bertahap memberlakukan kebijakan yang lebih akomodatif terhadap pendidikan Islam. Reformasi pendidikan "4+4+4" pada tahun 2012 memungkinkan pembukaan kembali tingkat menengah pertama sekolah Imam-Hatip dan memperkenalkan mata pelajaran agama pilihan seperti Kehidupan Nabi, Al-Qur'an, dan Pengetahuan Dasar Islam di sekolah umum. Diskriminasi terhadap lulusan sekolah Imam-Hatip dalam sistem penerimaan universitas juga dihapuskan, yang berujung pada peningkatan signifikan jumlah sekolah dan siswa Imam-Hatip (Nurhayati, 2021).

Kebijakan AKP yang pro-pendidikan Islam semakin intensif setelah upaya kudeta yang gagal pada Juli 2016. Periode ini menyaksikan ekspansi agresif sekolah Imam-Hatip, peningkatan alokasi anggaran untuk Diyanet (Direktorat Urusan Agama) yang mengelola pendidikan Al-Qur'an, dan revisi kurikulum nasional yang memberikan penekanan lebih pada nilai-nilai religius dan konservatif. Kebijakan-kebijakan ini telah memicu perdebatan tentang "Islamisasi" pendidikan dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan segmen sekuler masyarakat Turki tentang potensi erosi prinsip-prinsip sekularisme Kemalis (Mulyani, 2022).

SIMPULAN

Pendidikan Islam di Turki telah menempuh perjalanan panjang yang diwarnai berbagai dinamika dan transformasi. Dari sistem madrasah tradisional pada era Kekhalifahan Utsmaniyah hingga perkembangan kontemporer di bawah pemerintahan AKP, pendidikan Islam di Turki terus beradaptasi dengan perubahan sosial-politik dan tuntutan modernitas. Meskipun menghadapi tantangan berat selama era sekularisasi Kemalis, pendidikan Islam mampu bertahan dan bahkan mengalami kebangkitan dalam beberapa dekade terakhir. Pendidikan Islam di Turki memberikan pembelajaran berharga tentang kompleksitas hubungan antara agama dan negara dalam konteks negara dengan mayoritas Muslim yang berkomitmen pada prinsip sekularisme. Pengalaman Turki menunjukkan bahwa pendidikan Islam dapat beradaptasi dan berkembang bahkan dalam kerangka negara sekuler, selama ada ruang untuk negosiasi dan akomodasi.

Tantangan ke depan bagi pendidikan Islam di Turki adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mempertahankan nilai-nilai dan tradisi Islam dengan tuntutan dunia modern yang terus berubah. Hal ini memerlukan pendekatan yang inklusif dan progresif yang dapat menjembatani ketegangan antara tradisi dan modernitas. Dengan demikian, pendidikan Islam di Turki diharapkan dapat terus berkontribusi dalam pengembangan masyarakat Turki yang modern namun tetap berakar pada nilai-nilai dan identitas keislamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2018). Kebijakan Pendidikan Islam di Turki Era Kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan Tahun 2003-2014. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 3(1), 39-54.
- Azra, A. (2018). Pendidikan Islam di Turki: Antara Sekularisme dan Religiusitas. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 189-210.
- Harahap, S. (2020). Transformasi Pendidikan Islam di Turki: Dari Era Ottoman hingga Era Kontemporer. *Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 67-86.
- Hasan, N. (2019). Dinamika Pendidikan Islam di Turki: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Studi Islam*, 4(2), 112-134.
- Muhaimin, A. (2021). Fakultas Teologi dalam Sistem Pendidikan Tinggi di Turki. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 210-229.
- Nugraha, F. (2021). Dialektika Islam dan Sekularisme dalam Pendidikan di Turki Kontemporer. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 4(1), 78-96.
- Nurhakim, M. (2017). Kebijakan Pendidikan Islam di Turki dari Era Atatürk hingga Era AKP. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(1), 12-28.
- Suharto, T. (2021). Kebijakan Pendidikan Islam Era Erdogan dan Implikasinya Terhadap Transformasi Sosial di Turki. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 6(1), 34-54.
- Wibowo, A. (2020). Dinamika Polarisasi Politik-Agama di Turki Kontemporer dan Implikasinya Terhadap Pendidikan. *Jurnal Studi Politik dan Islam*, 5(2), 89-112.
- Amalia, R. (2018). Kebijakan Pendidikan Islam di Turki Era Kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan Tahun 2003-2014. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 3(1), 39-54.
- Amin, M. (2019). Transformasi Pendidikan Islam di Turki Era Atatürk. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(2), 221-240.
- Fadhillah, N. (2019). Sekularisasi Pendidikan di Turki: Analisis Kebijakan Pendidikan Mustafa Kemal Atatürk. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 173-192.
- Harahap, S. (2017). Peran Pendidikan Islam dalam Pembentukan Peradaban Utsmaniyah. *Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 67-86.
- Hasan, N. (2018). Modernisasi Pendidikan Islam di Turki: Telaah Pemikiran dan Kebijakan Mustafa Kemal Atatürk. *Jurnal Tarbiyah*, 25(2), 1-20.
- Maulana, A. (2017). Pendidikan Islam di Turki: Studi Komparatif dengan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(2), 145-162.
- Mudzakkir, A. (2018). Kebijakan Pendidikan Islam di Turki Era AKP. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 95-112.
- Nugraha, F. (2021). Dialektika Islam dan Sekularisme dalam Pendidikan di Turki Kontemporer. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 4(1), 78-96.
- Nurhakim, M. (2020). Sistem Pendidikan Turki: Antara Sekularisme dan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(1), 12-28.
- Rahman, F. (2020). Perkembangan Fakultas Teologi dalam Sistem Pendidikan Tinggi Turki. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 210-229.
- Syahputra, I. (2021). Politik Identitas dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam di Turki. *Jurnal Studi Islam*, 6(1), 55-72.
- Widodo, H. (2019). Sekolah Imam-Hatip dan Kontribusinya dalam Pendidikan Islam di Turki. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 16(2), 123-142.
- Azra, A. (2017). Pendidikan Islam di Turki: Dari Era Utsmani Hingga Republik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 189-210.
- Hasan, N. (2018). Aliran-Aliran Islam di Turki dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Pendidikan. *Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 45-68.

- Hasyim, S. (2018). Islam dan Negara di Turki: Analisis Historis dari Khilafah Utsmani hingga Era Republik. *Jurnal Politik Islam*, 3(2), 112-134.
- Hidayat, R. (2021). Simbol-Simbol Islam dalam Politik Kontemporer Turki: Studi Kasus Konversi Hagia Sophia. *Jurnal Kajian Timur Tengah*, 5(1), 23-42.
- Karim, A. (2019). Sejarah Masuknya Islam ke Anatolia dan Perkembangannya Hingga Era Utsmani. *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 2(1), 78-96.
- Masruri, M. (2021). Politik Luar Negeri Turki di Bawah AKP: Antara Neo-Ottomanisme dan Islam Politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 156-175.
- Mukti, A. (2019). Kebangkitan Islam Politik di Turki: Dari Erbakan hingga Erdogan. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 4(1), 67-89.
- Nurlaelawati, E. (2019). Gerakan Gülen dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Global. *Jurnal Studi Islam*, 5(2), 110-132.
- Rahman, A. (2020). Diyanet dan Perannya dalam Pengelolaan Islam di Turki. *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 9(1), 45-67.
- Suharto, T. (2021). Kebijakan Pendidikan Islam Era Erdogan dan Implikasinya Terhadap Transformasi Sosial di Turki. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 6(1), 34-54.
- Wibowo, A. (2020). Dinamika Polarisasi Politik-Agama di Turki Kontemporer. *Jurnal Studi Politik dan Islam*, 5(2), 89-112.
- Habiburrahman, F. (2019). Dinamika Sekolah Imam-Hatip dalam Sistem Pendidikan Turki. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 145-168.
- Muhaimin, A. (2021). Fakultas Teologi dan Kontribusinya dalam Pemikiran Islam Kontemporer di Turki. *Jurnal Studi Islam*, 6(1), 78-96.
- Nurhasanah, S. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam Era Erdogan: Analisis Politik dan Ideologi. *Jurnal Kajian Timur Tengah*, 6(2), 110-132.
- Saifuddin, A. (2019). Pendidikan Islam Non-Formal di Turki: Studi Kasus Kursus Al-Qur'an Diyanet. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(1), 45-68.
- Wibowo, R. (2020). Kurikulum Sekolah Imam-Hatip dalam Sistem Pendidikan Turki Modern. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(2), 89-112.
- Zulkarnain, I. (2018). Madrasah Era Utsmaniyah: Cikal Bakal Sistem Pendidikan Islam di Turki. *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 2(2), 120-142.
- Harahap, S. (2018). Dampak Intervensi Militer Terhadap Pendidikan Islam di Turki: Studi Kasus Peristiwa 28 Februari 1997. *Jurnal Studi Politik dan Islam*, 3(2), 78-96.
- Hidayati, N. (2018). Transformasi Pendidikan Islam dari Era Utsmaniyah ke Era Republik di Turki. *Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 112-134.
- Mulyani, S. (2022). Kontroversi Kebijakan Pendidikan Islam Era Erdogan dan Implikasinya Terhadap Sekularisme Turki. *Jurnal Kajian Timur Tengah*, 7(1), 45-67.
- Nurhayati, E. (2021). Sistem "4+4+4" dan Revitalisasi Pendidikan Islam dalam Kebijakan Pendidikan Turki Kontemporer. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 189-210.
- Rahman, F. (2020). Fluktuasi Kebijakan Pendidikan Islam di Turki dari Era Atatürk hingga Era AKP. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(1), 67-89.
- Zulkifli, M. (2019). Undang-Undang Unifikasi Pendidikan (Tevhid-i Tedrisat) dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam di Turki. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 16(2), 145-168.